

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, P. Soeria Atmadja. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arif, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Danil, Elwi. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank.
- Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Manullang, E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Moeljatno. 1999. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cet. Ke-20. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Cita Intrans Selaras.

- Palma, Alvon Kurnia. 2014. Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Rihantoro, Bayuaji. 2019. Hukum Pidana Korupsi: Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: LaksBang Justitia.
- Romli, Atmasasmita. 2004. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju.
- Widnyana, I Made. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Jurnal

- Bureni, Imelda F.K. 2016. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, Oktober, hlm. 295.
- Garnasih, Yenti. 2010. "Asset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, hlm. 630.
- Jamillah. 2015. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No. 2, hlm. 170–171.
- Mayasari, Dwika dan Sarah Wijayanti Putri. 2020. "Sistem Ekonomi Islam dalam Aspek Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 23, No. 2, hlm. 127.

- Sabar, A. L. D. Y. 2019. "Penanganan Korupsi di Indonesia Pasca Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 3.
- Simser, Jeffrey. 2006. "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines." *Journal of Money Laundering*, Vol. 9, No. 3, hlm. 297.
- Saputra, Refki. 2017. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Sudarto dan Hari Purwadi. 2017. "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. 5, No. 1, hlm. 110.
- ustrisia, Lola. 2022. "Mekanisme Pengembalian Aset di Negara Wilayah Asia Tenggara." *Jurnal*, Vol. 1, No. 1.

Naskah akademik

- Ramelan dan Tim Penyusun. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 ayat (22) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Pembendarahaan Negara.

Pasal 38 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi

Nugroho, Rizki Dwi. 2021. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Nur Kholifah, Rivanny Putri. 2023. Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi terhadap Koruptor yang Melarikan Diri. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Pratama, Ronaldo Galang. 2023. Implementasi Perampasan Harta Hasil Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Internet

DPR RI. "Program Legislasi Nasional.", dari <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.

Fariz, Donal. "Perlunya Aturan Illicit Enrichment untuk Cegah Korupsi", dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5273ab9aace4d/perlunya-aturan-illicit-enrichment-untuk-cegah-korupsi>.

Rais, Rozali. 2013. "Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan.", dari <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>.

Tim Detikcom. 2025. "Ahli Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan: Dukung Pemberantasan Korupsi.", dari <https://news.detik.com/berita/d-7297524/ahli-hukum-desak-ruu-perampasan-aset-disahkan-dukung-pemberantasan-korupsi>.

Wibawana, Widhia Arum. 2024. "Perbedaan RUU dan UU: Pengertian dan Proses Pembentukannya.", dari <https://news.detik.com/berita/d-6819563/perbedaan-ruu-dan-uu-pengertian-dan-proses-pembentukannya>.